

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Paket Pekerjaan	1.1	Kode RUP: 51140621 <i>[diisi dengan ID Kode RUP]</i>
	1.2	Nama paket pekerjaan: Pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2 <i>[diisi dengan nama paket pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan]</i>
	1.3	Uraian singkat paket pekerjaan: Pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2 <i>[diisi dengan uraian secara singkat dan jelas pekerjaan yang akan dilaksanakan]</i>
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Lumsum</i> <i>[diisi dengan Kontrak Lumsum/Harga Satuan]</i>
B. Identitas Pejabat Pengadaan	1.6	Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah <i>[diisi nama K?L/PD]</i>
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah <i>[diisi nama Pejabat Pengadaan, contoh: Pejabat Pengadaan Kementerian.....]</i>
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Gedung C Lantai 1 Jln. RTA Milono No.1 Palangka Raya <i>[diisi alamat Pejabat Pengadaan]</i>
	1.9	<i>Website</i> Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah:..... <i>[diisi alamat website K/L/PD]</i>
	1.10	<i>Website SPSE: https://lpse.kalteng.go.id/</i> <i>[contoh: lpse.lkpp.go.id]</i>
C. Sumber Pendanaan	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 <i>[diisi sumber dana dan tahun anggaran yang sesuai dokumen anggaran]</i> 2. Pagu Anggaran: Rp 200.000.000,00 <i>[diisi nilai nominal pagu anggaran pekerjaan yang akan dilaksanakan]</i>

		<p>3. <i>Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp 200.000.000,00</i> <i>[diisi nilai nominal HPS pekerjaan yang akan dilaksanakan]</i></p>																
<p>D. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha</p>	5	<p>Persyaratan Kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi; 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan b. Klasifikasi: c. Subklasifikasi : 3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak <i>[Valid/Tidak Valid]</i>. 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP); 7. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua. 																
<p>E. Masa Berlaku Penawaran</p>	7.3.a.2) 10.2.a.3)	<p>Masa berlaku surat penawaran : 30 (tiga puluh) hari kalender <i>[diisi waktu yang diperlukan untuk proses Pengadaan Langsung memperhatikan waktu yang diperlukan sampai dengan penandatanganan SPK]</i></p>																
<p>F. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</p>	7.2.a.3) 10.2.a.4)	<p>Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 90 (sembilan puluh) hari kalender <i>[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]</i></p>																
<p>G. Persyaratan Teknis</p>	10.3.e.1)	<p>Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 40%;">Jenis</th> <th style="width: 20%;">Kapasitas</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">----</td> <td style="text-align: center;">----</td> <td style="text-align: center;">----</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">----</td> <td style="text-align: center;">----</td> <td style="text-align: center;">----</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dst</td> <td style="text-align: center;">----</td> <td style="text-align: center;">----</td> <td style="text-align: center;">----</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan]</i></p> <p><i>Status Kepemilikan :</i></p>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	----	----	----	2	----	----	----	dst	----	----	----
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah															
1	----	----	----															
2	----	----	----															
dst	----	----	----															

	10.3.e.2)	<p>(1) <i>Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, inois);</i></p> <p>(2) <i>Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);</i></p> <p>(3) <i>Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.</i></p> <p>Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="776 728 1435 881"><thead><tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Pengalaman</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>==</td><td>==</td><td>==</td></tr><tr><td>2</td><td>==</td><td>==</td><td>==</td></tr><tr><td>dst</td><td>==</td><td>==</td><td>==</td></tr></tbody></table> <p><i>[diisi oleh Pejabat Pengadaan, untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan]</i></p> <p><i>Keterangan: Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat klarifikasi/negosiasi</i></p>	No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	==	==	==	2	==	==	==	dst	==	==	==
No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja															
1	==	==	==															
2	==	==	==															
dst	==	==	==															